

KONSISTEN BANTU KORBAN BENCANA ALAM SUMATRA, FPKS PERKUAT AKSI DAN ADVOKASI NASIONAL

**Dr. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI, M.Si.**
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Dr. AL MUZZAMMIL
YUSUF, M.Si.**
Presiden Partai
Keadilan Sejahtera

Anggota DPR RI M. Nasir Djamil Harapkan Presiden Tetapkan Banjir Besar sebagai Bencana Nasional

Jakarta (27/11) --- Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia. Menurutnya, langkah ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para korban yang kini menghadapi kondisi yang semakin parah dan memprihatinkan.

Nasir menjelaskan bahwa di Aceh dan beberapa daerah lain, banjir telah menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, dan distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak.



Informasi yang tersebar luas di berbagai platform media sosial juga menggambarkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan, baik dari aspek keselamatan warga maupun kerusakan infrastruktur.

“Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak barang elektronik dan kendaraan bermotor warga,” ujar Nasir.

Ia menilai bahwa penanganan bencana akan terhambat apabila pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Putusnya jalur darat di sejumlah wilayah mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok yang memperparah kondisi warga, khususnya yang mengungsi dan tidak dapat dijangkau secara cepat oleh bantuan daerah.

Nasir menegaskan bahwa kondisi banjir kali ini telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, penetapan bencana nasional dapat dilakukan apabila terdapat korban dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, serta menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana. Melihat situasi banjir yang terjadi di banyak provinsi, menurut Nasir, kondisi tersebut telah dengan jelas memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan tersebut.

“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, dan menyalurkan bantuan yang lebih besar serta terkoordinasi,” tegas anggota Fraksi PKS itu.

Nasir menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan karena itu ia meyakini bahwa Presiden Prabowo tidak akan ragu mengambil langkah luar biasa demi melindungi masyarakat yang saat ini terdampak banjir besar di berbagai daerah.

Soroti Bencana Banjir Bandang Sumatera, Meitri Citra Wardani Serukan Pertaubatan Ekologis

Jakarta (29/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir yang menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur.

“Kami merasa prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam terhadap warga yang menjadi korban bencana. Kami juga mendorong pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk meringankan penderitaan korban bencana alam,” ungkap Meitri, Sabtu (29/11/2025). Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI ini menegaskan, tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi krisis ekologis yang menuntut perubahan cara pandang dan tata kelola lingkungan secara menyeluruh. “Bencana ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk melakukan taubat ekologis sebagai wujud komitmen moral sekaligus langkah awal untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terus berulang dan semakin memperparah dampak bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, banjir bandang bukan semata-mata bencana alam, melainkan alarm keras bahwa kerusakan lingkungan, deforestasi, perubahan fungsi lahan, dan tata ruang yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. “Taubat ekologis perlu segera kita lakukan, yakni dengan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara kita mengelola alam,” tegas Meitri. Meitri menjelaskan, curah hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab bencana. Dia menyebut menurunnya daya dukung lingkungan akibat pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan terhadap operasi industri dan pertambangan telah memperbesar tingkat risiko kerentanan masyarakat. “Hujan tidak bisa kita kendalikan, tetapi kerusakan hutan dan sungai adalah akibat dari tangan kita sendiri. Taubat ekologis berarti jujur mengakui kesalahan kolektif dan memperbaikinya dengan tindakan nyata,” lanjutnya.

Meitri mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi izin pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana, melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan, serta memperkuat penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku perusakan lingkungan. Politisi muda PKS ini juga menekankan pentingnya pemulihan Aliran Sungai melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan, disertai penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Lebih jauh, Meitri mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan taubat ekologis sebagai gerakan moral bersama. Baginya, perubahan perilaku sehari-hari seperti menjaga kebersihan sungai, mengurangi sampah, dan menghentikan kebiasaan merusak alam adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. “Kita harus kembali pada prinsip keseimbangan. Setiap sampah yang dibuang sembarangan, setiap hutan yang ditebang tanpa reboisasi, dan setiap sungai yang dicemari adalah bom waktu. Taubat ekologis mengajak kita memperbaiki perilaku sehari-hari, mencintai alam sebagai amanah, bukan komoditas semata,” terangnya.

Meitri menambahkan, bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera harus menjadi titik balik untuk mengubah arah pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada kelestarian alam yang berkelanjutan. “Alam sudah sering mengingatkan kita, maka sepatutnya kita harus berubah. Perubahan itu bisa dimulai dengan pertaubatan kita dan mengawal secara serius pembangunan ekonomi yang harmonis dan selaras dengan pelestarian lingkungan alam,” pungkas Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini.



Dampak Banjir Sangat Parah, Anggota DPR RI Rahmat Saleh Desak Pusat Tetapkan Bencana Nasional



Padang (30/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional atas rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Rahmat menilai situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sudah menunjukkan skala bencana yang luas dan membutuhkan penanganan yang lebih terpadu. Menurutnya, banjir, longsor hingga galodo yang terjadi di tiga provinsi tersebut bukanlah peristiwa bencana biasa. Intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis wilayah membuat dampaknya sangat besar, terutama di Sumbar yang hampir mayoritas daerah mengalami dampak hingga berujung bencana. “Kita melihat banyak daerah terdampak secara bersamaan. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya di Padang, Sabtu (29/11/2025).

Rahmat menjelaskan, Sumbar menghadapi situasi paling berat karena topografinya yang terdiri dari perbukitan dan lembah. Banjir merendam permukiman, longsor menutup akses jalan, hingga aliran sungai yang meluap menyebabkan galodo. “Dengan kondisi geografis seperti ini, penanganan di lapangan menjadi lebih menantang. Karena itu perlu dukungan yang lebih kuat,” kata Rahmat.

Apalagi, bencana ekstrem ini telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini tentunya mempengaruhi berbagai sumber daya yang ada dalam menangani kebutuhan para korban, termasuk evakuasi. Saat ini pun beberapa daerah dilaporkan juga masih sulit dijangkau karena kendala medan lokasi. Menurutnya, penetapan status nasional akan membantu mempercepat koordinasi antarlembaga dan memudahkan mobilisasi bantuan, baik logistik, personil maupun alat berat. “Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, Rahmat mengingatkan, saat ini jumlah pengungsi terus bertambah hingga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pun tentunya meningkat. Ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, hingga tempat penampungan sementara menjadi prioritas yang harus ditangani secara serius.

“Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, proses penanganan bisa berjalan lebih efektif dan cepat,” jelasnya. Sebagai langkah lanjutan, dia mengaku juga telah mencoba berkoordinasi dengan stakeholder terkait atas permintaan tersebut.

Dia berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan segera langkah strategis yang lebih luas untuk percepatan penanganan bagi para korban, terutama menetapkan menjadi skala bencana nasional. “Yang kita harapkan sekarang adalah percepatan penanganan, agar dampak bencana ini bisa segera diminimalkan,” pungkasnya.

Surahman Hidayat Apresiasi Tim Gabungan Penanggulangan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Dorong Percepatan Bantuan

Jakarta (30/11) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 303 orang meninggal dunia, 279 orang masih hilang, serta puluhan ribu masyarakat terdampak dan mengungsi.

“Semoga seluruh korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta kekuatan iman dalam menghadapi ujian ini, yang masih hilang segera dapat ditemukan, serta masyarakat terdampak dan terpaksa harus mengungsi di posko-posko darurat diberikan kesabaran oleh Allah,” doa Surahman.

Selain itu, Surahman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penanganan dampak banjir dan longsor dikoordinasikan dengan cepat antarkementerian, termasuk percepatan distribusi bantuan logistik, medis, dan peralatan evakuasi ke wilayah terisolir; menggerakkan TNI-Polri bersama Basarnas, BNPB, dan BPBD untuk memperkuat operasi penyelamatan dan pemulihan darurat; serta menekankan pentingnya pemulihan jangka panjang, termasuk rehabilitasi infrastruktur, layanan pendidikan, dan dukungan sosial bagi keluarga korban. “Apresiasi setinggi-tingginya kepada Basarnas, BNPB, TNI, Polri, dan para relawan atas keikhlasan dan kerja keras dalam mengevakuasi korban, mencari korban yang masih hilang, mendirikan posko darurat, menyalurkan logistik dan layanan kesehatan, serta memberikan dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” ujar Surahman.

Surahman memahami bahwa akses komunikasi di sejumlah wilayah terputus akibat padamnya listrik sehingga menyulitkan koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat terdampak dan mengungsi untuk bersabar menghadapi kendala distribusi bantuan yang belum bisa cepat sampai akibat keterbatasan akses jalan, cuaca ekstrem, dan kondisi infrastruktur yang rusak. Namun, Surahman juga mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat penyaluran bantuan logistik, terutama makanan, air bersih, dan obat-obatan, agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.

“Saya yakin pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang berupaya optimal mempercepat penyaluran bantuan, terutama makanan dan obat-obatan, agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan sedang mengungsi segera terpenuhi. Saat ini diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi berjalan lancar meski menghadapi kendala akses jalan dan cuaca ekstrem,” kata Surahman.

Di samping itu, Surahman mengatakan bahwa saat ini banyak keluarga di luar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kesulitan mengetahui kondisi kerabat mereka akibat terbatasnya akses komunikasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar posko informasi nasional dan daerah diperkuat, termasuk layanan daring dan hotline, sehingga keluarga korban dapat memperoleh informasi yang jelas, cepat, dan terpercaya.

Surahman mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ini menjadi peringatan keras bahwa penguatan sistem mitigasi hidrometeorologi harus segera dilakukan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga perlu memperbaiki tata kelola lingkungan, memperkuat early warning system, dan memastikan kesiapsiagaan masyarakat agar bencana seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.



Anggota DPR RI Ghufuran Turun Langsung ke Lokasi Banjir di Pidie Jaya

Pidie Jaya (01/12) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ghufuran Zainal Abidin, meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (28/11/2025).

Kehadiran Ghufuran disambut antusias oleh warga yang selama ini terdampak banjir tahunan. Dalam kunjungan tersebut, Ghufuran turun bersama tim untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Pada kunjungan tersebut, Ghufuran berdialog dengan para korban banjir di Meureudu dan Pante Raja— dua wilayah yang kerap dilanda banjir serta mengalami pendangkalan pada kawasan muara. Menurutnya, persoalan banjir di Meureudu sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan penanganan permanen agar tidak terus berulang.



Ghufuran menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait banjir dan pendangkalan kuala telah ia terima sejak pertengahan November 2025. Salah satu keluhan terbesar datang dari nelayan Kuala Pante Raja yang kesulitan melaut akibat pendangkalan muara sehingga aktivitas ekonomi mereka ikut terdampak. “Warga meminta solusi jangka panjang, bukan penanganan sementara. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulan pembangunan infrastruktur strategis di Pidie Jaya,” ujar Ghufuran kepada Rakyat Aceh.

Sebelumnya, Bupati Pidie Jaya Sibril Malasyi telah mengajukan dua usulan prioritas kepada pemerintah pusat. Kedua usulan tersebut kemudian diperjuangkan Ghufuran melalui mekanisme DPR RI, khususnya terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Pembangunan Tebing Pengaman Sungai Krueng Meureudu – senilai Rp 96,65 miliar, untuk menahan erosi dan mengurangi risiko luapan air sungai yang menjadi penyebab banjir di wilayah pusat kota Meureudu. Pembangunan Jetty Kuala Pante Raja – senilai Rp 39 miliar, untuk mengatasi pendangkalan muara yang menghambat akses kapal nelayan keluar masuk kawasan perairan.

Surat resmi bernomor 34/GF/DPR-RI/XI/2025 telah disampaikan oleh Ghufuran kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjen Sumber Daya Air pada 17 November 2025. Kedua usulan tersebut diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada hari yang sama. Penerimaan ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat Pidie Jaya yang berharap pembangunan segera dilaksanakan.

Bagi warga Meureudu, pembangunan tebing pengaman sungai menjadi harapan besar untuk mengakhiri banjir tahunan yang merusak rumah, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi. Sementara bagi nelayan di Pante Raja, pembangunan jetty dianggap sangat penting untuk memulihkan kelancaran akses melaut setelah bertahun-tahun terhambat pendangkalan. Dengan turun langsung ke lokasi bencana, menerima aspirasi, dan mengawal usulan pembangunan infrastruktur strategis, Ghufuran menyatakan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Aceh, khususnya di daerah rawan bencana.

“Kami akan terus mengawal agar pembangunan ini tidak hanya disetujui, tetapi juga benar-benar direalisasikan di lapangan,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS: Tetapkan Segera Bencana Banjir di Sumatera sebagai Bencana Nasional!

Jakarta (01/12) --- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah untuk tidak menunda lebih lama penetapan status Bencana Nasional bagi banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.

“Sebagaimana kita saksikan dalam laporan di berbagai media, skala bencana sangat luas dengan kerusakan yang besar. Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolasi dan belum bisa mendapat akses bantuan. Sebagian pemerintah kabupaten lumpuh tak berdaya untuk melakukan tanggap darurat bencana. Melihat situasi ini, sudah selangkahnya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional.”

Sukamta tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilakukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI-Polri, serta pengiriman bantuan logistik. Namun demikian, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

“Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moral bagi mereka yang sedang terdampak bencana.”

Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, penetapan bencana berskala nasional menurut Sukamta juga memiliki sisi lain yang penting menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bahwa dampak bencana saat ini diperparah oleh kerusakan hutan. Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi.

“Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan menyuarkan hal ini, karena kerusakan hutan nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah

Sementara itu, sebagai wujud kepedulian, Sukamta PKS melakukan pemotongan gaji seluruh anggota bagi korban bencana.

berpotensi menimbulkan kerentanan nasional. Sudah banyak pihak di berbagai lokasi terlihat segera bertindak.”

menyatakan bahwa Fraksi FPKS untuk disumbangkan



Anggota Timwas Bencana DPR RI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Bandang dan Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional

Jakarta (02/12) — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Senin (1/12/2025) terus menelan korban jiwa.

Hal ini menjadi duka cita mendalam untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan bencana dahsyat tersebut. Termasuk Reni Astuti, Anggota DPR RI FPKS yang mengungkapkan rasa duka dan simpatinya untuk para korban. “Saya dan semua orang pasti sangat sedih atas Bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. saya turut berduka cita dan berharap para korban diberi ketabahan dan kekuatan.”, ujar Reni.

Berdasarkan data sementara Pusdatin BNPB 1 Desember 2025, total korban mencapai ribuan orang, dengan rincian 604 meninggal dunia, 464 masih kendala hilang, dan ribuan lainnya luka-luka. Para korban terdampak terpaksa mengungsi karena rumah, sekolah dan fasilitas umum terdampak rusak berat.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Kebencanaan DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan kejadian ini sebagai Bencana Nasional.

“Korban yang begitu banyak dan wilayah terdampak yang meluas memerlukan penanganan khusus. Akses menuju banyak lokasi sangat sulit dan beberapa titik bahkan terisolasi total. Pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk kondisi luar biasa ini,” ujar Reni dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Reni mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian/lembaga yang telah merespon mengirimkan bantuan sejak hari pertama bencana.

“Respon cepat Pemerintah patut diapresiasi. Kehadiran Presiden dan jajaran kementerian/lembaga di tengah masyarakat menunjukkan komitmen nyata dalam situasi yang sangat rumit ini,” tegasnya.

Reni menilai skala bencana saat ini telah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Hal ini juga tercermin dari pernyataan tiga Bupati di Aceh yang menyatakan kewalahan menghadapi dampak bencana yang terjadi.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Ketiganya menyampaikan bahwa kerusakan, jumlah korban, dan sulitnya akses evakuasi membuat mereka tidak mampu menangani situasi hanya dengan sumber daya daerah.

“Pernyataan tiga Bupati tersebut menjadi alarm bahwa ini sudah bukan kategori bencana biasa. Kapasitas daerah tidak mencukupi dan dibutuhkan intervensi nasional,” ujar Reni.



SELANJUTNYA ▶

◀ SEBELUMNYA

Menurut Reni, bencana di Sumatera tersebut telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional sebagaimana tercantum pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, antara lain: jumlah korban yang besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas, terganggunya pelayanan publik dan jalannya pemerintahan, serta rusaknya infrastruktur secara massif lintas kabupaten/kota.

“Melihat seluruh indikator tersebut, sudah tepat bila Pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional agar proses evakuasi, penanganan, dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Reni. Reni berharap Pemerintah segera menetapkan status bencana sebagai Bencana Nasional agar seluruh potensi penanganan, baik sumber daya manusia maupun logistik, dapat dimaksimalkan.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, Reni bersama seluruh Anggota DPR RI FPKS juga melakukan pemotongan gaji untuk dialokasikan khusus bagi bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana Aceh dan Sumatera.

Diakhir pernyataannya, Politisi Perempuan PKS ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan semua pihak yang telah membantu dan mengajak untuk terus mendoakan para korban, semoga senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan, serta seluruh wilayah yang terdampak dapat segera pulih seperti sedia kala.



Tifatul Sembiring Terjun Langsung Tinjau Pengungsian Banjir, PKS Salurkan 2.500 Paket Sembako untuk Warga Terdampak



Medan (02/12) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Tifatul Sembiring, turun langsung meninjau kondisi pengungsian banjir di Hampan Perak, Deli Serdang, dan sejumlah titik lain di Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Tifatul mendapati bahwa para pengungsi masih menghadapi keterbatasan makanan dan kebutuhan dasar karena banyak rumah makan dan warung nasi tutup akibat aktivitas warga yang lumpuh diterjang banjir.

Tifatul menyampaikan bahwa kader dan relawan PKS sejak awal telah mengelola tempat pengungsian, menyiapkan dapur darurat, serta mendampingi warga yang terdampak. Ia sendiri berinteraksi langsung dengan para pengungsi, memberikan penguatan dan taushiyah agar warga tetap tegar menghadapi musibah. Di lokasi, kader PKS juga telah membagikan 500 paket sembako berisi beras 5 kilogram, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, khususnya lansia, perempuan, dan anak-anak.

Sebagai bagian dari instruksi umum Presiden PKS untuk percepatan respons bencana, sebanyak 2.500 paket sembako mulai disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Penyaluran dilakukan melalui struktur DPD PKS. Untuk Kota Medan, 1.000 paket sembako diserahkan secara simbolik kepada Ketua DPD PKS Medan. Sementara itu, 1.000 paket lainnya diserahkan kepada Ketua DPD PKS Deli Serdang, Ismail, untuk didistribusikan kepada warga yang paling membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian PKS terhadap masyarakat yang kesulitan memperoleh makanan dan kebutuhan dasar akibat terputusnya akses logistik.

Tifatul menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus bergerak lebih cepat dan meningkatkan koordinasi lintas lembaga agar penanganan banjir dapat dilakukan dengan lebih efektif. Menurutnya, banjir yang melanda Medan dan Deli Serdang bukan kejadian biasa, mengingat luasnya area terdampak dan banyaknya warga yang harus mengungsi. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan peningkatan status penanganan bencana apabila kondisi terus memburuk agar sumber daya dapat dimobilisasi secara optimal, termasuk dukungan BNPB, BPBD, TNI/Polri, serta layanan kesehatan darurat. Ia juga meminta agar tempat-tempat pengungsian diperkuat dengan pasokan logistik yang lebih stabil, layanan medis yang memadai, serta armada evakuasi yang siap menjangkau warga yang masih bertahan di rumah masing-masing karena akses yang sulit.

Dalam keterangannya, Tifatul menyampaikan apresiasi kepada para kader dan relawan PKS yang terus bekerja tanpa lelah membantu masyarakat di tengah kondisi sulit tersebut. Ia menegaskan bahwa solidaritas antarwarga adalah modal terkuat dalam menghadapi bencana, dan PKS akan terus hadir di garis depan bersama rakyat, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi sekaligus mendorong pemerintah memberi perhatian penuh terhadap keselamatan dan pemulihan warga.

Anggota DPR RI: Pemerintah Harus Segera Tetapkan Banjir Bandang Aceh–Sumut– Sumbar sebagai Bencana Nasional



Jakarta (03/12) — Anggota DPR RI Ansory Siregar mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional, mengingat perkembangan data terbaru yang menunjukkan skala bencana sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

Menurut Ansory, tragedi di tiga provinsi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai musibah regional, melainkan sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan mobilisasi penuh dari pemerintah pusat. Berdasarkan data resmi BNPB yang dirilis pada 2 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai 659 jiwa, sementara 475 orang dilaporkan masih hilang dan 2.600 orang mengalami luka-luka. Selain itu, tercatat 3,2 juta jiwa terdampak, dengan lebih dari 1,1 juta orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak atau wilayahnya tak lagi aman dihuni. Tim SAR gabungan BASARNAS juga telah mengevakuasi 33.173 warga dari berbagai zona berbahaya, menunjukkan bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari stabil dan terus bergerak dinamis.

Tidak hanya korban jiwa dan pengungsian massal, dampak infrastruktur pun tergolong berat. Ribuan rumah warga rusak total, puluhan jembatan dan fasilitas publik hancur, serta akses jalan di sejumlah kabupaten terputus dan belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Sejumlah laporan lapangan menyebutkan bahwa beberapa kawasan terdampak masih terisolasi dan hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau alur logistik terbatas. Dengan melihat skala kerusakan dan dampaknya, Ansory menilai pengelolaan bencana tidak lagi efektif jika dibebankan pada pemerintah provinsi masing-masing. Ia menekankan bahwa penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang koordinasi terpadu, percepatan distribusi logistik, pengerahan alat berat dalam jumlah besar, penyediaan anggaran pemulihan yang lebih luas, serta penanganan kesehatan masyarakat yang lebih cepat dan menyeluruh. Tanpa status tersebut, upaya pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi berpotensi berjalan lambat karena keterbatasan kewenangan dan anggaran di tingkat daerah.

“Pemerintah harus hadir sepenuhnya. Ini tragedi besar, bukan bencana biasa. Korban di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak boleh menghadapi musibah sebesar ini sendirian. Dengan data sebesar ini, keputusan untuk menetapkan Bencana Nasional justru merupakan tindakan yang paling rasional dan paling manusiawi,” tegas Ansory. Ia juga meminta agar pemerintah segera menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, termasuk audit kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera. Menurutnya, bencana kali ini harus menjadi titik balik tata kelola lingkungan dan mitigasi risiko di Indonesia.

Ansory memastikan DPR akan mengawal proses ini agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret. Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar semua pihak mengedepankan solidaritas nasional. “Ini bukan hanya duka Sumatera. Ini duka Indonesia.”

Fraksi PKS DPR RI Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh



Banda Aceh (03/12) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyerahkan langsung bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggap darurat PKS yang juga sebelumnya telah disalurkan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan bantuan ini merupakan tahap pertama dan insyaallah akan disusul dengan tahap-tahap berikutnya. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

“Kami semua ikut bersedih atas musibah ini. Mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir, tidak hanya untuk Aceh, tetapi juga untuk seluruh Indonesia,” kata Abdul Kharis di Kantor DPW PKS Aceh, di Banda Aceh, Rabu 3 November 2025. Sementara itu, Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, mengatakan seluruh kader dan anggota Fraksi PKS di DPRA telah dikerahkan untuk terjun langsung ke daerah-daerah terdampak di kabupaten/kota di seluruh Aceh.

“Kita berharap roda ekonomi masyarakat segera berputar kembali. Seluruh anggota DPRA kita intens turun ke kabupaten dan kota di Aceh,” ujar Ismunandar. Ia mengakui bantuan yang disalurkan tidak dalam jumlah besar, namun diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana.

“Bantuan kita memang tidak terlalu besar, tapi kita berharap bisa dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak,” tambahnya. PKS juga telah menggerakkan relawan ke sejumlah wilayah yang terdampak cukup parah, di antaranya Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Di dua daerah tersebut, PKS mendirikan sebanyak 16 posko tanggap bencana untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat. “Kita bantu dan kerahkan relawan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana,” jelas Ismunandar.



Ribuan Sekolah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Fikri Faqih Desak Langkah Darurat Penyelamatan Pendidikan

Jakarta (03/12) --- Bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan, dengan catatan kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah.

Merespons kondisi krisis ini, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi. Legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

Menurutnya, menyelamatkan tempat belajar sama artinya dengan menyelamatkan kelangsungan masa depan generasi muda yang terdampak musibah. "Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita," kata Fikri di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Fikri menyadari bahwa revitalisasi seribu lebih sekolah yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen. Oleh karena itu, ia mendorong kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

"Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana," tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Selain masalah pendanaan, Fikri menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Fikri lantas mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat sesegera mungkin, namun dengan catatan harus memperhatikan kondisi psikologis siswa.

Dia juga mengingatkan bahwa sebelum memulai proses belajar mengajar, asesmen terhadap trauma siswa harus dilakukan terlebih dahulu.

"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing," imbuhnya.

Guna memaksimalkan pemulihan psikologis siswa, Fikri menyarankan pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi.



SELANJUTNYA ►

◀ SEBELUMNYA

Kemendikdasmen diminta menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menerapkan metode trauma healing yang efektif, salah satunya melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat. Sebagai alternatif metode pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Namun, mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana kemungkinan besar lumpuh, pemerintah diminta proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa. “PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” ujar Fikri.

Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah serius membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah ini diambil mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), sehingga sistem pendidikan nasional harus adaptif dan tangguh menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana yang selalu muncul,” pungkas alumni program Doktor Ilmu Lingkungan



foto: cnnindonesia

DPR: KLH Harus Jadi Benteng Utama, Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Jakarta (04/12) --- Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, Ak., menyampaikan duka mendalam atas musibah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menelan 605 korban jiwa hingga 3 Desember 2025 dan dianggap sebagai tangisan alam akibat keserakahan.

Legislator asal FPKS menyoroti deforestasi dan kerusakan lingkungan masif di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain. Kawasan hutan kini tersisa sekitar 5 juta hektare dari 15 juta hektare pada tahun 2000-an. Ini akibat praktik pertambangan, perkebunan, dan bisnis yang kurang bertanggung jawab.

"Kementerian LH harus menjadi benteng utama dan garda terdepan, bukan sekadar pelayan administratif," tegasnya kepada Menteri LH. Jalal menyerukan KLH memperkuat otoritas penuh untuk menindak tegas pelaku perusak lingkungan tanpa pandang bulu, bahkan mencabut izinnya.

"Kami merekomendasikan pergeseran paradigma dari izin bisnis menjadi izin ekologis," kata Aleg asal Dapil Jabar VII. Keberlanjutan ekosistem harus menjadi syarat mutlak setiap kegiatan ekonomi. Restorasi ekosistem wajib menjadi program prioritas nasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sesuai prinsip agama. Pembacaan Surah Ar-Rahman menjadi landasan pentingnya menjaga neraca atau keadilan ekologis. Dibutuhkan revitalisasi serta perbaikan lingkungan, seiring dengan penguatan komitmen perlindungan lingkungan yang termuat dalam Amdal. Restorasi juga harus melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama.

Jalal Abdul Nasir juga meminta KLH mengawal aspirasi masyarakat Cilamaya yang telah berjuang panjang mengadukan pencemaran limbah.



antarafoto: yudimananar

Lonjakan Deforestasi Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif: Komisi IV Minta Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja

Jakarta (05/12) --- Lonjakan deforestasi di Sumatera kembali menjadi sorotan setelah data terbaru menunjukkan kehilangan hutan yang signifikan di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor. Sumatera Utara tercatat kehilangan 19.563 hektare, Sumatera Barat 10.521 hektare, dan Aceh 14.890 hektare.

Laporan Simontini 2024 bahkan menyebutkan bahwa sebagian besar deforestasi berasal dari sektor berizin seperti perkebunan kayu, tambang, sawit, dan logging. “Ketika kerusakan justru didominasi pemegang izin, itu artinya pengawasan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet.

Lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan juga memperburuk situasi. Dari semua operasi pengamanan hutan, hanya satu kasus di Aceh, empat di Sumatera Utara, dan satu di Sumatera Barat yang berhasil mencapai tahap P21. Di sisi lain, data Kementerian ESDM dan JATAM mengungkapkan keberadaan 1.907 izin tambang aktif dengan luas lebih dari 2,45 juta hektare di Pulau Sumatera. Menurut Slamet, kombinasi lemahnya penegakan hukum dan ledakan izin ekstraktif membuat kawasan hutan kehilangan fungsi ekologisnya secara cepat. “Bagaimana masyarakat bisa terlindungi dari bencana jika kawasan lindung terus dipersempit oleh izin-izin besar?” tegasnya.

Kondisi semakin mengkhawatirkan setelah deforestasi nasional melonjak 97.124 hektare atau 81,6 persen pada periode 2019–2024. Komisi IV menilai lonjakan ini terkait erat dengan perubahan kebijakan melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 23/2021 yang menghapus persetujuan DPR dalam alih fungsi kawasan hutan, termasuk hutan lindung. Kebijakan ini dinilai melemahkan sistem kontrol dan mengabaikan mandat menjaga minimal 30 persen kawasan hutan di tiap daerah. “Ketika fungsi kontrol DPR dihilangkan, maka izin-izin keluar tanpa ada keseimbangan pengawasan. Dampaknya kini kita lihat langsung dalam bentuk bencana ekologis,” kata Anggota Komisi IV tersebut.

Menutup keterangannya, Slamet mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin kehutanan dan pertambangan, memperkuat pengawasan lapangan, dan meningkatkan keberanian dalam penegakan hukum. Ia juga menegaskan bahwa revisi UU Cipta Kerja kini menjadi keharusan demi mengembalikan mekanisme check and balance serta menjaga kewajiban 30 persen tutupan kawasan hutan per daerah. Tanpa revisi regulasi tersebut, ia menilai kerusakan ekologis di Sumatera dan daerah lain hanya akan terus membesar dan kembali menimbulkan korban.





Aus Hidayat Nur Desak Kementerian ATR/BPN Sigap Hadapi Persoalan yang Muncul Pasca Bencana

Jakarta (07/12) — Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur kami mengingatkan dan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bersiap menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah bencana banjir dan longsor Sumatera.

"Bencana hari ini akan surut dengan izin Allah, namun persoalan pertanahan yang ditinggalkannya akan memberi beban baru jika tidak ditangani dengan cepat, cermat, dan manusiawi," ujar Aus melalui rilis media, Sabtu 6 Desember 2025.

"Kami berharap pemerintah dapat bergerak dengan langkah yang ringan namun tegas: mendata tanah yang hilang, memetakan kembali wilayah yang berubah, membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen mereka, serta membuka posko pertanahan yang benar-benar hadir dekat dengan rakyat," ucap anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Kalimantan timur tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang tertimpa musibah, tanah bukan sekadar bidang di peta, ia adalah tempat tumbuh kenangan, tempat berlabuh masa depan, dan jaminan terakhir bagi keberlangsungan hidup.

"Di balik puing-puing yang berserakan, ada keluarga yang bertanya-tanya di mana batas rumahnya, ada petani yang kebingungan mencari kembali lahannya, dan ada masyarakat adat yang kehilangan pijakan atas tanah leluhur yang selama ini mereka jaga dengan sepenuh hati," katanya lagi.

Aus berharap agar kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi "pelita" bagi mereka yang masih berada dalam gelapnya ketidakpastian. "Semoga langkah-langkah yang dilakukan dapat mengembalikan rasa aman dan harapan setidaknya sebesar keyakinan bahwa tanah yang mereka pijak adalah benar milik mereka, dijaga dan dilindungi sepenuhnya oleh negara," pungkasnya.



AP Photo: Binsar bakkara

Achmad Ru'yat Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera

Jakarta (08/12) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas serangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (08/12).

Achmad Ru'yat mengawali pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban dan masyarakat yang terdampak.

“Yang pertama, saya Ahmad Ruyad berduka cita atas bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa skala kerusakan serta dampak kemanusiaan yang timbul menuntut respons luar biasa dari pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.

“Saya mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional,” tegas Ru'yat. Dengan penetapan tersebut, Ru'yat menilai pemerintah dapat mengerahkan sumber daya dan dukungan anggaran yang lebih besar serta terkoordinasi untuk mempercepat penanganan.

“Sehingga dengan status bencana nasional, maka akan ada kebijakan anggaran untuk bisa membantu mengatasi musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.



Kurniasih Dorong Layanan Psikososial Siswa dan Guru Terdampak Banjir Sumatera

Jakarta (08/12) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa penanganan pascabencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut) tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur pendidikan. Ia menekankan bahwa pemulihan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan setelah Kemendikdasmen merilis data terbaru bahwa 1.009 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi—310 di Aceh, 385 di Sumut, dan 314 di Sumbar. Kerusakan sekolah yang luas ini, kata Kurniasih, memiliki dampak langsung terhadap kondisi mental anak dan tenaga pendidik. “Kerusakan sekolah tidak hanya meruntuhkan ruang belajar, tetapi juga mengguncang rasa aman anak-anak. Kita harus ingat bahwa mereka baru saja melewati pengalaman traumatis—terjebak banjir, kehilangan barang, bahkan harus mengungsi,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

Menurut laporan lapangan dari berbagai lembaga humanitarian, banyak anak di pos pengungsian menunjukkan tanda stres seperti mudah menangis, takut berpisah dari orang tua, sulit tidur, hingga kehilangan konsentrasi belajar. “Pembelajaran di posko pengungsian tidak boleh disamakan dengan pembelajaran reguler. Fasilitas boleh sederhana, tapi pendekatannya harus ramah psikologis. Anak butuh aktivitas pemulihan, bukan tekanan,” tegas Kurniasih.

Ia meminta pemerintah daerah menggandeng konselor sekolah, psikolog, relawan MHPSS, dan tenaga pendidik untuk mengadakan kegiatan trauma healing, kelas kreatif, seni, dan permainan terstruktur. Kurniasih mengingatkan bahwa guru bukan sekadar fasilitator pendidikan—mereka juga manusia yang terdampak langsung oleh bencana. Banyak guru di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Pasaman, Padang Pariaman, dan Deli Serdang dilaporkan kehilangan rumah, kendaraan, dokumen pribadi, serta perlengkapan mengajar. Di sejumlah titik, guru mengajar di tenda darurat sambil tetap tinggal di pengungsian.

“Guru juga mengalami trauma. Ada guru yang kehilangan rumah dan asetnya, tapi tetap mengajar anak-anak di pengungsian. Stres mereka berat dan kita tidak boleh mengabaikan kondisi mereka,” katanya.

Kurniasih menegaskan bahwa guru membutuhkan pendampingan mental, bukan hanya bantuan logistik. Ia mendesak Kemendikdasmen dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dukungan psikososial (MHPSS) khusus tenaga pendidik dan siswa, memberi insentif tambahan untuk guru terdampak, serta menyediakan ruang aman bagi guru untuk memulihkan kondisi emosionalnya.

Bagi Komisi X, pemulihan psikososial merupakan aspek yang tidak boleh dilewati dalam penanganan darurat pendidikan. “Anak yang trauma tidak siap belajar. Guru yang lelah secara emosional tidak siap mengajar. Maka pemulihan psikososial harus menjadi pilar utama pemulihan pendidikan pascabencana,” ujar Kurniasih.

Ia juga meminta agar data terkait jumlah siswa dan guru yang membutuhkan layanan psikososial disampaikan secara terbuka, agar bantuan dari lembaga kemanusiaan dan psikolog dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.



Kerusakan Terlalu Parah, Nevi Zuairina Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Jakarta (08/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nevi yang berasal dari wilayah terdampak menyampaikan duka mendalam dan komitmen kuat untuk memperjuangkan pemulihan daerah bencana. "Saya sebagai wakil rakyat berasal dari daerah yang terkena musibah banjir bandang beberapa tahun lalu, mengucapkan duka cita yang tidak terhingga kepada korban terdampak banjir bandang ini. Insya Allah kami dari wakil rakyat berjuang supaya daerah yang terkena dampak tersebut akan menjadi baik kembali seperti semula, bahkan lebih baik ke depan," ujar Nevi.

Ia mengapresiasi kehadiran Presiden yang telah meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, Nevi menilai langkah tersebut belum cukup tanpa kebijakan penetapan status bencana nasional. "Kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, kemarin Bapak Presiden sudah sampai di Aceh, di Sumatera Barat, bahkan di Sumut. Tapi tidak cukup sampai di situ," tegasnya.

Nevi mengungkapkan data sementara yang disampaikan BNPB menunjukkan besarnya skala kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana tersebut. "Kami dengar laporannya dari BNPB bahwa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat itu sebanyak Rp50 triliun, bahkan bisa lebih. Rp13-12 triliunnya ada di Sumut dan di Sumbar, dan lebih banyak lagi di Aceh sampai Rp25 triliun," jelasnya.

Namun menurut Nevi, angka itu berpotensi meningkat tajam karena proses pendataan masih berlangsung. "Saya yakin dan percaya angkanya akan lebih besar lagi karena sekarang masih update pendataan oleh BNPB," katanya. Nevi menegaskan bahwa skala kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, serta cakupan lintas provinsi sudah memenuhi syarat penetapan bencana nasional.



"Kami berharap pemerintah pusat segera menetapkan musibah ini menjadi bencana nasional karena sudah mencakup tiga provinsi dan banyak jiwa yang melayang, bahkan sampai sekarang ada yang belum ditemukan," ujarnya. Kerusakan fasilitas publik, khususnya sekolah dan rumah warga, disebut Nevi sebagai aspek paling menyedihkan dari tragedi ini. "Yang paling sedih buat kami adalah sekolah-sekolah banyak hancur, rumah-rumah banyak yang hanyut. Infrastruktur terlalu lantak," ungkapnya. Ia menilai bahwa tanpa status bencana nasional, proses pemulihan akan berjalan sangat berat.

"Kalau pemerintah pusat tidak segera menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional, ya mungkin akan berat ke depan. Dengan menetapkan status bencana nasional, recovery akan segera berjalan," ujar Nevi. Nevi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa perhatian penuh dari pemerintah pusat adalah kunci pemulihan cepat bagi masyarakat terdampak. "Kesedihan yang mereka alami akan segera terobati dengan perhatian yang penuh, full power dari pemerintah pusat terhadap korban-korban bencana," tandasnya.

Riyono Caping: Kemenhut Harus Ungkap 12 Pelaku Perusakan Hutan Penyebab Bencana Banjir 30 Hari



Jakarta (09/12) --- Raker Kemenhut dan Komisi IV memberikan kesimpulan bahwa adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera.

“Hasil Raker nomor 3 disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tambang ilegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulan. Itu pendapat saya,” papar Riyono Caping, Adeg Komisi IV DPR F-PKS.

Kerusakan alam hebat dan korban meninggal dunia yang mencapai lebih dari 800 orang membawa duka nasional. Banyak daerah yang terisolir dan belum mampu dijangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan. Kerugian material bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun, baik infrastruktur ataupun sektor ekonomi.

“Raker memberikan gambaran, paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi, faktanya kerusakan bencana ini sangat besar. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat,” tambah Riyono Caping, Komisi IV DPR.

Video viral log kayu yang terbawa banjir diduga hasil illegal logging yang dilakukan oleh pemegang izin usaha namun justru melakukan tindakan ilegal dengan penebangan dan membuka tambang.

“Sampai sekarang Kemenhut belum bisa menjelaskan siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa oleh arus banjir ini. Apakah dari aktivitas ilegal atau legal? Mungkin jumlahnya bisa ratusan kubik? Semua belum jelas sampai saat ini,” tanya Riyono Caping.

Menhut Raja Juli menyebutkan ada 12 objek hukum yang sedang dalam proses. Siapa saja mereka? Belum ada yang disampaikan kepada publik.

“Menhut harus tegas dan cepat. Waktu 30 hari bersamaan dengan dimulainya kembali masa sidang DPR tahun 2026. Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini,” tutup Riyono.

Ateng Sutisna Desak Kaji Ulang Amdal Perusahaan di Beberapa DAS, Perlu Libatkan CSO & LSM

Jakarta (09/12) --- Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai perbedaan pernyataan antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bupati Tapanuli Tengah terkait penyebab banjir bandang di wilayahnya menunjukkan adanya persoalan serius pada kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak. Salah satunya terkait log kayu yang ditemukan dan mengindikasikan adanya aktivitas penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, perbedaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi KLH dengan fakta lapangan yang disampaikan pemda. Situasi ini harus dibaca sebagai indikasi adanya aktivitas ilegal yang perlu ditindaklanjuti secara hukum. Sehingga ia mendukung penuh rencana Menteri LH untuk meninjau ulang dokumen Persetujuan Lingkungan (AMDAL) minimal 8 perusahaan aktif yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara bagian barat.

“Ini langkah penting. Kajian ulang AMDAL harus menjadi momentum untuk meluruskan dan mengoreksi dokumen lingkungan yang diterbitkan pada era sebelumnya,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa perhatian KLH tidak boleh hanya berhenti pada 8 perusahaan tersebut, sebab masih terdapat berbagai aktivitas lain baik perusahaan maupun kegiatan masyarakat yang berpotensi tidak memiliki dokumen lingkungan standar, tetapi turut merusak kawasan hulu. Ia menyebut pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (CSO) dan LSM lingkungan untuk membantu KLH dalam menyediakan data, temuan lapangan, dan informasi independen yang tidak selalu dapat diperoleh dari sumber resmi ataupun dari perusahaan.

“Mereka sudah lama memiliki kerja di wilayah itu. Informasi mereka bisa sangat penting untuk memastikan transparansi dan mengisi celah data yang tidak dimiliki KLH,” tegasnya. Ateng menilai bahwa rencana Menteri LH untuk mengaktifkan kembali Forum CSO–KLH akan menjadi wadah yang tepat untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Ia juga menyoroti bahwa persoalan tidak hanya terjadi di DAS Batang Toru, tetapi juga pada beberapa DAS kritis lain seperti DAS Asahan, DAS Barumun, DAS Aek Mandailing – Aek Tapus, DAS Aek Sosa – Aek Silang, dan DAS Aek Sihapas – Aek Sirumambe.

Sehingga KLH perlu memanggil delapan perusahaan di DAS Batang Toru dan memperluas pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan di DAS sekitar. Langkah ini harus dilengkapi dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk Penegakan hukum oleh jika ditemukan pelanggaran. “KLH butuh partner untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.



Abdul Hadi Desak Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Dorong Penetapan Bencana Nasional untuk Sumatra

Jakarta (08/12) --- Menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem dan rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (08/12).

Abdul Hadi menyampaikan bahwa periode Desember hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem yang membutuhkan langkah antisipatif ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Desember, Januari, Februari itu adalah iklim yang sangat ekstrem, sehingga memang butuh pengawalan, butuh mitigasi yang lebih awal dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan peralatan di titik-titik rawan risiko. “Kami minta pemerintah harus menyiagakan baik itu sumber daya manusianya dan peralatan-peralatan beratnya di tempat-tempat tersebut,” tegasnya.

Abdul Hadi menyoroti kerusakan infrastruktur yang cukup parah di sejumlah daerah di Sumatra akibat bencana hidrometeorologi dalam beberapa pekan terakhir. “Infrastruktur kita hampir sekian banyak yang rusak. Karena kondisi ini di luar kemampuan pemerintah daerah, maka keterlibatan hadirnya pemerintah pusat itu agar bisa tumbuh kembali masyarakat kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, dan irigasi harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR. “Masyarakat kita harus bisa melalui jembatan yang layak dulu, kemudian jalan dibersihkan, dan irigasi yang baik,” jelasnya.

Lebih jauh, Abdul Hadi juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu lintas lembaga. “Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih tegas sebenarnya dalam bentuk bencana nasional sehingga semua unsur, baik TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta masyarakat bahkan luar negeri itu bisa ikut nimbrung mempercepat mengatasi kebencanaan yang besar,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pembelajaran kolektif serta peningkatan kewaspadaan di seluruh daerah.

“Harus menjadi pelajaran yang baik kesiap-siagaan dari semua pemerintah daerah itu bisa untuk mengantisipasi lebih awal. Kita bersama-sama siap untuk menghadapi hal-hal yang di luar kemungkinan,” tutupnya.



Desak Status Bencana Nasional, Hamid Noor Yasin Ingatkan Pemerintah: Kerusakan Alam adalah Akibat Ulah Manusia

Jakarta (08/12) --- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12).

Hamid mengawali pernyataannya dengan mengajak seluruh bangsa merenungkan akar dari bencana yang terus berulang. Ia menyinggung peringatan moral dan spiritual bahwa kerusakan alam tidak terjadi tanpa sebab. “Jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan pada kita, zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, telah terjadi kerusakan di bumi dan lautan karena ulah tangan manusia,” ujar Hamid.

Menurutnya, pesan itu relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang kerap dilanda bencana ekologis. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. “Ini perlu evaluasi diri, perlu koreksi diri secara menyeluruh. Seluruh elemen bangsa harus menjaga kelestarian alam di Nusantara,” tegasnya.

Hamid juga menyoroti pentingnya penanganan cepat dan terkoordinasi untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai skala bencana sudah cukup untuk meningkatkan status penanganannya. “Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus mendapatkan perhatian serius, perhatian lebih, serta diprioritaskan,” katanya.

Karena itu, ia meminta Presiden agar segera menetapkan status bencana alam nasional, agar penanganan dan pemulihan (recovery) dapat dilakukan lebih fokus dan menyeluruh.

“Saya menekankan agar pemerintah menetapkan status bencana itu menjadi bencana alam nasional, sehingga perhatian pemerintah bisa lebih fokus dalam penanganan dan recovery,” ujar Hamid.



Netty Prasetiyani Serukan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penanganan Bencana Sumatera



Jakarta (08/12) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12), Netty menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan kelompok rentan dalam penanganan bencana.

Netty mengawali dengan menyampaikan belasungkawa atas banyaknya korban jiwa dan warga terdampak. “Secara pribadi kami menyampaikan duka yang mendalam, keprihatinan yang mendalam atas wafatnya dan terdampaknya masyarakat dari bencana alam yang menimpa saudara kita di kawasan Sumatera,” ujarnya.

Netty menekankan bahwa di antara para penyintas bencana terdapat kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan fasilitas khusus. Ia meminta pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bagi mereka. “Karena di antara warga yang terdampak ada kelompok rentan dan disabilitas, saya berharap pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap perempuan dan ibu hamil yang hari ini membutuhkan fasilitas khusus, termasuk air bersih dan logistik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi anak-anak yang mengalami kehilangan orang tua, tempat tinggal, maupun rasa aman akibat bencana. “Ada kelompok rentan bernama anak yang pastinya banyak mengalami kehilangan, tentu trauma healing ini perlu dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Selain anak dan perempuan, lansia juga menjadi perhatian serius karena banyak yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan layanan kesehatan rutin. “Lansia yang banyak memiliki komorbid tentu harus dipikirkan bagaimana caranya agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tidak boleh terputus,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Netty mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada angka atau statistik semata. “Akhirnya bencana bukan sekadar angka, bukan sekadar kemampuan,” pungkasnya, menegaskan bahwa bencana menyangkut keselamatan dan martabat manusia yang terdampak.

Jaga Hutan, Jaga Kehidupan: Johan Rosihan Minta Pemerintah Bertindak Serius Atasi Kerusakan Hutan Pemicu Banjir Besar

Jakarta (08/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa banjir bandang yang melanda Sumatera Utara harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak untuk menghentikan kerusakan hutan dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin (08/12).

Johan menyebut kejadian di Sumatera Utara hanyalah bagian dari rangkaian bencana yang dipicu kerusakan ekosistem di banyak daerah di Indonesia. “Kejadian banjir bandang di Sumatera Utara itu membuka mata semua pihak. Termasuk di Papua, di Kalimantan, bahkan di Dapil saya di Sumbawa. Ini sudah harus menjadi peringatan keras kepada kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat,” ujar Johan.

Ia menyoroti bahwa kondisi hutan Indonesia berada pada titik kritis dan membutuhkan penanganan segera. “Kondisi hutan kita saat ini sudah sangat, sudah sangat rusak. Mari kita belajar dari kejadian Sumatera ini, mari kita jaga hutan kita,” tegasnya.

Johan juga memberikan perhatian khusus kepada Panitia Kerja (Panja) terkait alih fungsi lahan di Komisi IV DPR RI. Ia menegaskan bahwa Panja harus bekerja secara serius tanpa kompromis. “Kepada Komisi IV yang sudah membentuk Panja alih fungsi lahan, itu harus bekerja dengan serius. Tidak boleh main-main, karena memang kondisi hutan sudah sangat rusak,” ucapnya.

Menurut Johan, bencana banjir menunjukkan betapa mahalnya nilai ekologis hutan ketika kerusakan sudah terjadi. “Satu titik hutan kita rusak baru kita tahu nilai ekologisnya. Kerugiannya di mana-mana, baik material maupun lainnya yang sangat besar akibat banjir ini,” tuturnya.

Johan mengajak semua pihak untuk kembali melihat hutan sebagai sumber kehidupan yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi mendatang.

“Bangun kesadaran bersama agar hutan kembali kita hijaukan, kita jaga bersama-sama, karena itu sumber penghidupan kita. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Wariskan hutan yang baik kepada anak cucu kita,” tutupnya.



Saadiah Uluputty di Tanah Bencana Sumbar: Serukan Status Nasional dan Desak Negara Hadir Sepenuhnya

Padang (11/12) — Di tengah hujan lebat yang mengguyur sejak pagi, Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, S.T., tiba di Bandara Minangkabau untuk memulai kunjungan reses ke wilayah yang tengah dilanda bencana besar (10/12/2025). Pesawat yang ditumpanginya mendarat dengan aman meski landasan pacu licin dan tergenang air, sebuah keberuntungan mengingat beberapa pesawat lain terpaksa dialihkan ke Bengkulu akibat cuaca ekstrem.

Kedatangannya disambut Bupati Padang Pariaman dan Wali Kota Padang. Suasana menjadi haru ketika Bupati John Kennedy Azis menahan tangis saat menggambarkan kerusakan besar di daerahnya. “Padang Pariaman seperti mundur 20 tahun. Banyak infrastruktur rusak, masyarakat terisolasi, jembatan putus,” ujarnya.



Skala bencana memang sangat besar. Longsor, banjir bandang, dan kerusakan akses vital membuat pelayanan publik lumpuh dan menelan banyak korban jiwa. Beberapa jenazah bahkan harus dievakuasi dengan helikopter karena lokasi yang terisolasi. Gubernur Mahyeldi dalam rapat bersama Komisi V melaporkan adanya 914 titik kerusakan infrastruktur, menjadikan Sumbar provinsi dengan kerusakan terluas di Sumatera. “Bencana ini membawa duka besar dan menghancurkan banyak rumah serta akses publik. Kami membutuhkan percepatan penanganan,” tegasnya.

Merespons situasi tersebut, Saadiah menilai kapasitas pemerintah daerah telah mencapai batas maksimal. “Bencana ini memenuhi seluruh kriteria penetapan Status Bencana Alam Nasional, sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2021,” jelasnya. Ia menekankan bahwa status nasional akan membuka keterlibatan penuh pemerintah pusat—mulai dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, hingga Kementerian PU dan Kemenhub—untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Setelah rapat, rombongan meninjau kawasan Lembah Anai di Tanah Datar. Di sepanjang perjalanan, Saadiah menyaksikan jalan yang putus, sungai yang melebar akibat debit air dari hulu, serta puluhan titik longsor yang menutup akses. Jalur lintas Sumatera tampak hampir tanpa lalu lintas karena lumpuh total. Wakil Menteri PU memberikan arahan untuk memasang jembatan Bailey di titik strategis, menambah alat berat, mempercepat penanganan 203 titik longsor, serta menstabilkan tebing di kawasan rawan. Saadiah menegaskan bahwa kunjungan Komisi V bukan agenda formal semata, melainkan wujud tanggung jawab moral negara. “Seluruh elemen negara harus hadir penuh. Sumatera Barat harus bangkit dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi bencana ke depan,” ucapnya.

Dalam perjalanan pulang, Saadiah menuliskan catatan harian yang bernada empati. Ia mengenang momen ketika menyerahkan bantuan dari uang perjalanan kepada pengurus bidang perempuan di Posko Bencana DPW PKS Sumbar. “Ada haru dalam hati, teringat ketika Maluku diguncang gempa, saudara-saudara PKS dari seluruh Indonesia membantu kami. Kini mereka berduka—maka duka mereka adalah duka bersama. Duka Sumatera adalah duka Indonesia,” tulisnya. Catatan tersebut menutup hari panjang penuh lumpur, air mata, dan harapan. Saadiah kembali ke Jakarta membawa satu pesan kuat: Sumatera Barat tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus hadir—segera, kuat, dan sepenuhnya.



Kolaborasi Untuk Sumatera

PKS APRESIASI KERJASAMA TANGGAP BENCANA PEMERINTAH - SIPIL

**Dukung Arahannya Presiden untuk Sinergitas
TNI-Polri dan BNPB**





Overview Bencana Sumatera 2025

*Update: 29 Desember 2025

3 pekan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menimpa Sumatera



1140

Meninggal Dunia



52

kabupaten/kota terdampak langsung



166.925

Rumah Rusak



875

Sekolah Rusak



806

Masjid dan Musholla Rusak



734

Jembatan Rusak



399.200

Masih Mengungsi



163

Masih Hilang

*Aceh jadi daerah dengan pengungsi terbanyak (473.000)



Kolaborasi Percepat Penanganan Bencana

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Masyarakat bergandeng tangan, berkolaborasi percepat penanganan bencana

1 Mobilisasi Personel:
>50.000 personel TNI, Polri, dan Basarnas diterjunkan



2 Perbaiki Infrastruktur Pembangunan Jembatan Bailey oleh Kementerian PU

3 Operasi Modifikasi Cuaca di tiga provinsi dengan 4 pesawat





4

Distribusi Logistik
1.266.004 Kg Muatan
Logistik bantuan telah terdistribusi via Udara, Darat, dan Laut kolaborasi TNI, BNPB, dan Sipil



5

Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Penanganan Bencana



foto:koopsudaranasional



PKS: Komitmen Gerak Cepat Penanganan Bencana

1. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengeluarkan Instruksi Presiden, **membentuk Satgas Siaga Bencana PKS**
2. Sekjen PKS Muhammad Kholid **pimpin langsung koordinasi di lapangan**, memastikan rantai komando yang terstruktur
3. Respons Cepat PKS: Hadir di Lokasi sejak Hari-H bencana, **bangun dapur umum dan evakuasi.**
4. **Komitmen Potong Gaji Pejabat Publik PKS** untuk disalurkan sebagai bantuan logistik ke wilayah terdampak
5. **Kolaborasi PKS dan TNI-Polri-BNPB:** Personel dengan alat berat membuka akses jalan di ruas desa dan jalan utama Relawan PKS beriringan mendistribusikan logistik ke desa-desa yang baru terbuka aksesnya
6. PKS secara resmi mengusulkan **pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Bencana Sumatera**





Duka Masih Belum Usai

Kolaborasi penanganan bencana masih harus dilanjutkan, pemenuhan kebutuhan masyarakat jadi prioritas kita semua Berdasarkan data BNPB dan temuan PKS di lapangan, berikut adalah kebutuhan yang belum terpenuhi:

1 Hunian

Tenda Keluarga, Material Huntara, (Seng, Kayu), Dana Tunggu Hunian.

2 Air & Sanitasi

Penjernih Air, Sumur Bor, Toilet Portable

3 Psikososial

Layanan Kesehatan Mental, Perlengkapan Sekolah, Mainan Edukasi

4 Pembersihan

Alat Kebersihan untuk Lumpur





Arahan Presiden

Presiden memberikan arahan spesifik kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk:

- 1. Menindak tegas aparat** yang melindungi kegiatan penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.
- 2. Memberikan penghargaan** kepada anggota TNI-Polri, termasuk kenaikan pangkat, kepada anggota yang bekerja keras di lapangan, terutama yang **mempertaruhkan nyawa dalam penanganan bencana.**
- 3. Untuk BNPB, Presiden mengakui** peran dan kekuatan mereka dalam penanganan bencana, **apresiasi atas kinerja yang sudah berjalan.**





”

“Kami meyakini bahwa penanganan bencana akan jauh lebih efektif ketika negara dan masyarakat sipil saling menguatkan. **Relawan PKS berkomitmen untuk terus hadir, bekerja bersama TNI dan BNPB, hingga masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana benar-benar tuntas**”

H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.SI









Sekjen PKS





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



-  Website **fraksi.pks.id**
-  Instagram **fraksipksdprri**
-  Youtube **PKSTV DPR RI**
-  Facebook **Fraksi PKS DPR RI**
-  X (twitter) | **@FPKSDPRRI**
-  Tiktok **Fraksi PKS DPR RI**
-  Telegram **Fraksi PKS DPR RI**
-  Whatsapp **Fraksi PKS DPR RI**

**SIAP
BERJUANG**